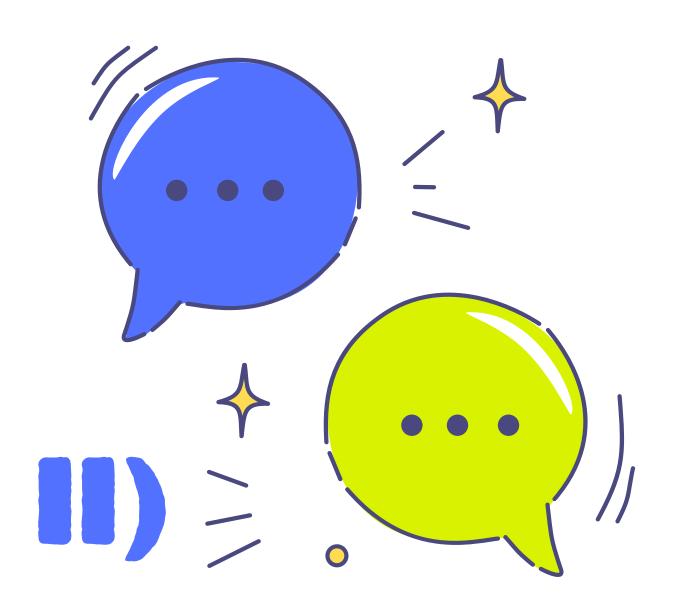
PENELITIAN KUALITATIF

TINJAUAN PUSTAKA (BAB II)

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



TINJAUAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN KUALITATIF



APA ITU TINJAUAN PUSTAKA?

Bagian dari penelitian yang memaparkan teoritis, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, digunakan sebagai "lensa analisis"

FUNGSI TINJAUAN PUSTAKA

- Memberikan dasar teoritis bagi penelitian
- Menunjukkan keterkaitan penelitian dengan studi sebelumnya
- Mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap)
- Mengarahkan fokus penelitian agar lebih jelas dan terarah secara konsep



STRUKTUR/ KOMPONEN TINJAUAN PUSTAKA



PENELITIAN TERDAHULU

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, digunakan sebagai bahan pembanding atau mencari research gap, baik dari konteks lokal maupun internasional

LANDASAN TEORI

Menguraikan teori yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti serta menjelaskan konsep-konsep pokok yang digunakan dalam penelitian.

Dapat berisi teori, konsep, atau model yang relevan dengan penelitian.

KERANGKA BERPIKIR

Alur berpikir logis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dengan hasil yang diharapkan dari penelitian sebagai arah analisis pada penelitian

TEORI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK



MENGENAL GRAND THEORY, MIDDLE THEORY, DAN APPLIED THEORY

Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory adalah konsep dalam ilmu sosial yang menunjukkan perbedaan tingkat abstraksi serta penerapan teori. Tingkatan teori ini dapat membantu peneliti dalam memilih lensa analisis yang tepat dengan memahami:

"Dari kerangka konseptual sangat luas (grand), ke teori yang lebih fokus dan empiris (middle), sampai model atau teori yang sangat kontekstual dan aplikatif (applied)."



GRAND THEORY (TEORI BESAR)

- Grand theory merupakan teori dengan tingkat abstraksi yang sangat tinggi dan bersifat umum. Teori ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena sosial yang kompleks dan luas, dengan fokus pada pertanyaan mendasar terkait struktur sosial, hubungan antarindividu, serta dinamika masyarakat dalam skala makro.
- Di penelitian kualitatif, grand theory sering dipakai sebagai background atau untuk menempatkan studi dalam tradisi teori besar, bukan untuk analisis rinci.

CONTOH GRAND THEORY

Teori Birokrasi (Bureaucratic Theory) - Max Weber (1992)

Weber memperkenalkan teori birokrasi sebagai kerangka besar untuk memahami organisasi publik. Fokus pada rasionalitas, hierarki, aturan formal, dan pembagian kerja yang jelas. Menjelaskan bagaimana organisasi publik seharusnya berjalan secara efisien, impersonal, dan berdasarkan sistem merit.



MIDDLE THEORY (TEORI MENENGAH)

- Sebagai jembatan antara grand theory dan applied theory, middle theory bersifat lebih terarah daripada teori yang sangat abstrak, tetapi tidak sespesifik teori terapan. Middle theory digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam ruang lingkup tertentu dengan kerangka analisis yang lebih terbatas.
- Lebih fokus pada mekanisme, proses, atau hubungan antar-variabel dan menghubungkan konsep teoretis dengan indikator empiris.

CONTOH MIDDLE THEORY

Theory of Street-Level Bureaucracy - Michael Lipsky (1980)

Teori ini berfokus untuk menjelaskan peran pegawai birokrasi di level bawah (seperti guru, polisi, petugas pelayanan publik) yang punya diskresi besar dalam implementasi kebijakan. Untuk menunjukkan bagaimana kebijakan publik sebenarnya "dibentuk" di level implementasi, bukan hanya di level pusat



APPLIED THEORY (TEORITERAPAN)

- Applied theory merupakan jenis teori yang bersifat praktis serta berorientasi langsung pada pemecahan masalah nyata. Teori ini dirancang untuk menjelaskan fenomena atau situasi tertentu secara kontekstual, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis, memahami, maupun mencari solusi atas permasalahan spesifik di lapangan.
- Menghasilkan konsep/variabel yang operasional dan sering dipakai sebagai alat analisis praktis. Bisa berbentuk model (mis. model penerimaan teknologi) atau kerangka praktik.

CONTOH APPLIED THEORY

Model Good Governance - UNDP (1997)

Menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum.

Penerapannya menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintahan daerah atau lembaga publik.